



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

KARTANEGARA

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026

BPKNPD 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA

RENCANA STRATEGIS

2021-2026



BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegaran Tahun 2021 - 2026, merupakan dokumen strategis, sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra BPKAD Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra), merupakan dokumen rencana lima tahunan yang berisi informasi dan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegaran Tahun 2021 -2026.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026, terdiri dari pendahuluan, gambaran pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegaran, Isu – isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan BPKAD Tahun 2021 – 2026, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif dan indikator kinerja, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BADAN PENGELOLA KEUANG DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUKOTJO, S. E.

Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP, 19730908 1993021001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD	6
2.2 Sumber Daya BPKAD	10
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Renstra Provinsi	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1 Tujuan	31
4.2 Sasaran	31
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jabatan dan Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	10
Tabel 2.2	Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	11
Tabel 2.3	Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018	11
Tabel 2.4	Daftar Barang BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	12
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016	16
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016	17
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016	18
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	21
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	32
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	35
Tabel 6.1	Rencana Program dan Strategi Pertama	39
Tabel 6.2	Rencana Program dan Strategi Kedua	40
Tabel 6.3	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	9
Gambar 6.1	Kerangka Logis Keterkaitan RPJMD dengan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 72 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. menyusun Renstra SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yaitu yang termasuk urusan wajib adalah bidang pemerintahan umum.

Dalam kaitan tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Renstra BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
15. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2021. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (REPJMD) Kutai Kartanegara periode 2021 – 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026.

Maksud penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021–2026 sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun **tujuannya** yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar OPD;
- b) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;

- c) Mendukung program Bupati Kutai Kartanegara di bidang perencanaan;
- d) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) BAB. Masing-masing BAB memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Landasan Hukum
- 3. Maksud dan Tujuan
- 4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

- 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2. Sumber Daya BPKAD
- 3. Kinerja Pelayanan BPKAD
- 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD

- 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD
- 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan
2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi
2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dijabarkan bahwa BPKAD mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah, dibidang BPKAD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2016 tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

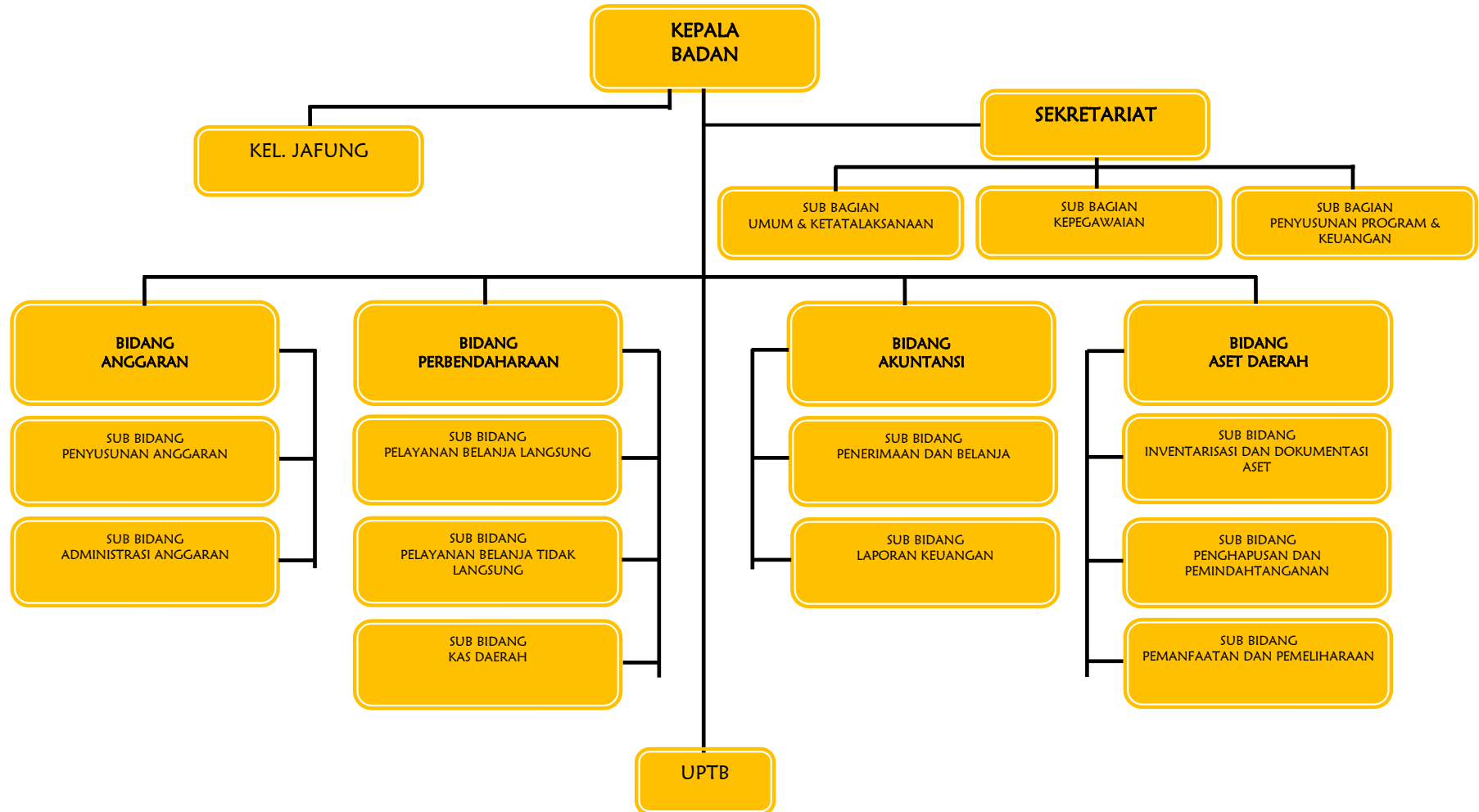
- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Administrasi Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja Langsung;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penerimaan dan Belanja; dan
 - 2. Sub Bidang Laporan Keuangan;
- f. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset;
 - 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan; dan
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan ASet.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara



2.2. SUMBER DAYA BPKAD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di BPKAD.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Per Bulan Juni 2021, sebanyak 179 orang. Penjelasan mengenai pegawai BPKAD disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jabatan dan Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021

	Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
<i>A</i>	<i>Pejabat Struktural</i>				
	Kepala (Eselon II/b)	1	1	0	1
	Sekretaris (Eselon III/a)	1		1	1
	Kepala Bidang (Eselon III/b)	4	3	1	4
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	3	2	1	3
	Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	10	8	2	10
<i>B</i>	<i>Jabatan Fungsional Tertentu</i>				
	Fungsional Perencana :				
	Tingkat Muda		0	0	0
	Tingkat Pertama		0	0	0
	Fungsional Barang Jasa :				
	Tingkat Muda		0	0	0
	Tingkat Pertama		0	0	0
<i>C</i>	<i>Fungsional Umum</i>	160	96	64	160
	<i>Fungsional Umum Non PNS</i>				

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Juni 2021

Tabel 2.2
Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	0	1	1
S2	10	4	14
S1	25	37	62
Diploma III	0	1	1
Diploma II	0	0	0
Diploma I	0	0	0
SLTA	73	27	100
SLTP	1	0	1
SD	0	0	0

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Juni 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa ASN BPKAD yang berpendidikan S1 dan SLTA memiliki jumlah paling banyak yaitu masing-masing 62 dan 100 orang. Sedangkan ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 14 orang. ASN berdasarkan pangkat/golongan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2021

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
Pembina Tk. I (IV/b)	1	1	1
Pembina (IV/a)	8	2	10
Penata Tk. I (III/d)	14	22	36
Penata (III/c)	6	9	15
Penata Muda Tk. I (III/b)	6	9	15
Penata Muda (III/a)	4	4	8
Pengatur Tk. I (II/d)	39	11	50
Pengatur (II/c)	23	12	35

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	6	0	6
Pengatur Muda (II/a)	2	0	2
Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Juni 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan inventaris kantor/aset kantor yang secara umum dikelola atau dikoordinir sekretariat, yang dalam operasional pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung jawabnya.

Secara ringkas sebaran Sarana dan prasarana kantor pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Daftar Barang BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021

No	Jenis	Sekretariat	Bid. Anggaran	Bid. Perbendaharaan	Bid. Akuntansi	Bid. Aset Daerah	Bid. Pengembangan Aset	Jumlah
A	Kendaraan operasional							
1	Kendaraan Roda 4	5	1	1	1		1	9 unit
2	Kendaraan Roda 2	7		1		1	1	10 unit
B	Alat Kantor dan Rumah Tangga							
1	Mesin Foto copy dengan Kertas double Folio	3	1	3	1	1	1	10 buah
2	Lemari Kaca	2						2 buah
3	Alat Penghancur Kertas	6						6 buah
4	Cassette Recorder	1						1 buah
5	Amplifiler	2						2 buah
6	Loudspeaker	10						10 buah
7	Sound System	6	2	1		1	1	11 buah
8	Microphone	1						1 buah
9	Alat Hiasan	113		9				122 buah

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

No	Jenis	Sekretariat	Bid. Anggaran	Bid. Perbendaharaan	Bid. Akuntansi	Bid. Aset Daerah	Bid. Pengembangan Aset	Jumlah
10	Alat Rumah Tangga Lain-lain	89	1	1				91 buah
11	Gorden	3						3 buah
12	P.C. Unit	28	32	34	31	34	24	183 buah
13	Lap Top	9	2	5	2	11	3	32 buah
14	Note Book	13	10	4	5	1	6	39 buah
15	Printer	26	34	32	25	20	20	157 buah
16	Server			1		1		2 buah
17	Perkakas Pengangkat Lain-lain	5	2	1		1	1	10 buah
18	Jam Ukur (Meet Lock)	8	2	1	3	1		15 buah
19	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2	2	2		1		7 buah
20	Mesin Ketik Elektronik			2				2 buah
21	Mesin Hitung Elektronik							10 buah
22	Lemari Besi	2	2	1				5 buah
23	Lemari Kayu		13					13 buah
24	Mesin Absensi	1	1	1	1	1	1	6 buah
25	Papan Struktur Instansi	2	2	1				5 buah
26	Mesin Penghancur Kertas	4	4	6		2	1	17 buah
27	Sofa	6						6 buah
28	Moubiler Lainnya			1				1 buah
29	Mesin Penghisap debu	1						1 buah
30	Lemari ES	5	1	1		1	1	9 buah
31	Kipas Angin	4						4 buah
32	Televisi	8	3	13	1	1		26 buah
33	Wireless	2						2 buah
34	Tangga Alumunium	1						1 buah
35	Dispenser	2	1	2	1	1	1	8 buah
36	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1						1 buah
37	Bola Api	1	1	1	1	1	1	6 buah
38	CCTV	2		3				5 buah
39	Hard Disk	13	15		18			46 buah
40	Scanner	1	1		2			4 buah

No	Jenis	Sekretariat	Bid. Anggaran	Bid. Perbandaharaan	Bid. Akuntansi	Bid. Aset Daerah	Bid. Pengembangan Aset	Jumlah
41	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	5					6 buah
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	25	36	27	4	5	111 buah
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	3		2			9 buah
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	78	45	30		1	158 buah
45	Proyektor + Attachment	3	7		3	3		16 buah
46	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	43	9	10	8	3	79 buah
47	Peralatan studio Visual Lain-lain	6	4			3	1	14 buah
48	Camera Electronic	8	5				9	22 buah
49	Facsimile	4	1				1	6 buah
50	Lukisan Cat Air	8					2	10 buah

Sumber: *Bagian Umum dan Ketatalaksanaan BPKAD, 2021*

2.3. KINERJA PELAYANAN BPKAD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra BPKAD periode tahun lalu (2016-2021), maka diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi, dan sebagian lagi memiliki kinerja tinggi. Hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat capaian kinerja yang sedang. Hal ini disajikan di Tabel T.C.23 yang memuat capaian kinerja BPKAD lima tahun terakhir.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya Predikat akuntabilitas BPKAD	70		B	B	BB	BB	A	B	B	B	BB	B	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase ketepatan waktu Penetapan APBD dan APBD Perubahan	100		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	100		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	90		70 %	75 %	80 %	90 %	100 %	75 %	80 %	90 %	286 %	100 %	107,14 %	106,67 %	112,50 %	317,78 %	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	75		60 %	60 %	65 %	75 %	80 %	70 %	70 %	75 %	75 %	75 %	116,67 %	116,67 %	115,38 %	100,00 %	93,75 %

Selain pencapaian kinerja BPKAD mulai Tahun 2016 sampai 2021, perlu disajikan juga kinerja pengelolaan keuangan BPKAD. Berdasarkan data yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.24 diketahui bahwa rasio anggaran dan realisasi belanja langsung BPKAD selama 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif yaitu berkisar 64% sampai 76%. Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga penentuan target kinerja dapat berbanding lurus dengan pagu anggaran yang dibutuhkan. Diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih efisien dan efektif.

Tabel. T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
TOTAL	552,815,716,75 3.34	577,048,964,55 0.72	740,152,523,97 0.44	995,756,722,37 3.89	582,411,397 .123	432,184,609,05 4.00	477,246,671,61 5.00	611,850,271,31 1.00	748,586,764,33 7.26	582,411,397 .123	78.18	82.70	82.67	75.18	100	7,16	10,50
BELANJA TIDAK LANGSUNG	533,113,257 .635,34	555,880,228 .550,72	711,175,493 .966,44	970,168,452 .443,21	0	436,922,125 .889	460,875,502 .835	589,448,980 .403	729,200,247 .277,26	0	78,21	82,91	82,88	75,16	0	7,16	10,50
BELANJA LANGSUNG	19,702,459,118	21,168,736,000	28,977,029,404	25,588,209,931	582,411,397 .123	15,262,483,165	16,371,148,780	22,401,290,908	19,386,517,060	582,411,397 .123	77,46	77,34	77,31	75,76	100	552,18	733,71
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	4.185.775,214	5.220.201,942	5.931.603,904	4.259.145,970	-	4.006.650,870	4.731.847,158	5.377.324,271	3.188.941,623	-	95,72	90,64	90,66	74,87	-	0,58	87,97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	671.427.504	1.535.000,000	2.563.436,000	2.807.071,359	-	497.379,102	949.944,229	2.240.229,266	2.347.136,564	-	74,08	61,89	87,39	83,62	-	61,10	76,74

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	-	75.000.000	75.000.000	45.000.000	-	-	65.263.000	75.000.000	43.867.800	-	-	87,02	100,00	97,48	-	(15,66)	71,13
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	521.837.200	125.000.000	600.000.000	285.000.000	-	447.051.800	106.872.600	533.726.808	112.002.200	-	85,67	85,50	88,95	39,30	-	(18,26)	74,86
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	1.505.000,00	2.082.668,058	1.000.289,500	3.117.436,000	-	850.852,051	1.431.169,291	920.329,700	2.850.517,253	-	56,54	68,72	92,01	91,44	-	27,47	77,17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	8.370.866,000	11.957.200,000	9.888.123,910	-	-	6.956.394,567	8.706.789,351	7.229.935,825	-	-	83,10	72,82	73,12	-	5,71	76,35
Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah.	-	3.760.000,000	6.849.500,000	5.186.432,692	-	-	2.129.657,935	4.547.891,512	3.614.115,795	-	-	56,64	66,40	69,68	-	11,32	64,24
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.	620.000.000	-	-	-	-	473.670.964	-	-	-	-	76,40	-	-	-	-	-	76,40

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	484.135.000	484.135.000	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.044.084,353	22.044.084,353	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.117.918,220	2.117.918,220	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.399.394,124	12.399.394,124	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.432.800	961.432.800	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.432.800	961.432.800	-	-	-	-	100,00	-	100,00

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.820.000,200	3.820.000,200	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.080.911,910	1.080.911,910	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.308.733,126	1.308.733,126	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	535.103.817,000	535.103.817,000	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.129.537,590	2.129.537,590	-	-	-	-	100,00	-	100,00

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKAD

2.3.1. Tantangan

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Dinamika perubahan regulasi kebijakan nasional yang cukup sering harus direspon oleh daerah secara cepat.
2. Tuntutan perwujudan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih 2021 - 2026 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026.
3. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan perencanaan yang berkualitas dan memiliki kinerja tinggi.
4. *Goodgovernance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan.
5. Kecenderungan penurunan pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir yang berdampak pada terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan perlunya dilakukan perubahan perencanaan.

Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius BPKAD dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kutai Kartanegara.

2.3.2. Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, BPKAD juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Penataan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
2. Dukungan Undang–Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Adanya Pedoman Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
4. Penyusunan APBD yang semakin profesional sehingga tidak ada konflik kepentingan(*conflict of interest*) yang dapat menghambat penetapan dan pelaksanaan APBD.
5. Dukungan Kepala Daerah memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.
6. Beberapa program yang telah direncanakan dalam 5 tahun kedepan sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik.
7. Perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan pelaporan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BPKAD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelola keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Dualisme peraturan yang ada selama ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah	Dua kekuatan yang selama ini menjadi regulator pengelolaan keuangan daerah yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memiliki kebijakan tersendiri yang dalam beberapa hal berbeda sehingga menimbulkan tanda tanya besar di daerah
		Belum optimalnya	diperlukan sumber daya manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Praktek akuntansi double entry berbasis akrual	(SDM) yang memahami logika akuntansi secara baik. Aparatur Pemerintah Daerah yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran, melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya pada rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda
		keterbatasan jumlah SDM yang menguasai logika akuntansi	Banyaknya SDM keuangan Pemerintah Daerah yang berlatar belakang non akuntansi
		Belum optimalnya rekrutmen pegawai untuk mengatasi keterbatasan SDM sesuai dengan kompetensinya.	Selain Faktor SDM, model seleksi pegawai yang diterapkan masih bersifat umum dan belum menggali aspek kompetensi akuntansi Aparatur Pemerintah Daerah yang menangani keuangan

Dari pemetaan permasalahan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dualisme peraturan yang ada selama ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah harus tunduk pada paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di sisi lainnya, Pemerintah Daerah harus tunduk pada paket Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan turunannya yaitu Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 77 tahun 2020. Dua kekuatan yang selama ini menjadi regulator pengelolaan keuangan daerah yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memiliki kebijakan tersendiri yang dalam beberapa hal berbeda sehingga menimbulkan tanda tanya besar di daerah. Pengelola Keuangan Daerah dibuat bingung harus memakai peraturan yang mana. Ketika mereka menggunakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Kemendagri, mereka pada akhirnya harus menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Contoh kasus sederhana adalah dalam menyusun laporan keuangan, daerah harus menyusun laporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 77 tahun 2020 kemudian mereka harus mengkonversi laporan keuangan tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Akan ada pekerjaan ganda, sehingga menimbulkan inefisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Akan ada standar ganda yang berbeda di daerah, sehingga penyusunan dan pengintegrasian pelaporan keuangan daerah sulit dilaksanakan. Selain itu resiko terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun pencatatan sangat besar.

- 2) Praktik akuntansi double entry berbasis akrual, memiliki kandungan informasi yang lebih baik kepada publik karena tidak saja menginformasikan jumlah dana masyarakat yang dibelanjakan, melainkan juga menginformasikan nilai aset yang dibeli maupun yang dikuasai Pemerintah Daerah. Dengan demikian, potensi maupun kinerja keuangan Pemerintah Daerah akan tergambar secara lebih baik, jika menggunakan praktik akuntansi double entry berbasis akrual tersebut. Permasalahannya, untuk menerapkan akuntansi double entry berbasis akrual diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami logika akuntansi secara baik. Aparatur Pemerintah Daerah yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran, melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya pada rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda. Kegagalan SDM pemda dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan

berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

- 3) Pemerintah Daerah umumnya memiliki keterbatasan jumlah SDM yang menguasai logika akuntansi. Banyaknya SDM keuangan Pemerintah Daerah yang berlatar belakang non akuntansi merupakan satu kendala utama saat ini. Akibatnya, berbagai pelatihan yang diadakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat tidak memberikan hasil maksimal.
- 4) Rekrutmen pegawai untuk mengatasi keterbatasan SDM selama ini belumlah optimal dalam memperoleh pegawai dengan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh model seleksi pegawai yang diterapkan masih bersifat umum dan belum menggali aspek kompetensi akuntansi peserta ujian. Di samping faktor SDM.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Adapun Visi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, yaitu:

**“ Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara
Yang Sejahtera dan Berbahagia “**

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera. Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia. Selain visi dan Misi, pasangan Edi

Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu Kukar Idaman. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan

Upaya mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN bahagia, serta Program Kukar bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye.

2. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya

Misi kedua dari Visi Bupati terpilih fokus pada pembangunan Sumber daya manusia. Di era modern ini, sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan

berbudaya merupakan aset bagi daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sehingga semakin berkualitas SDM, tujuan dapat dicapai. Program kampanye yang diusulkan yang menjadi program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain, Program 1000 Guru Sarjana, Progra pembangunan sekolah digital, program beasiswa KUKAR IDAMAN, Program keluarga peduli kesehatan, Program kukar siap kerja, Program kuka berbudaya, Program gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN) serta program kesejahteraan sosial.

3. Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Misi ketiga adalah Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewableresources). Program yang diusulkan untuk mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program pembangunan pertanian berbasis kawasan, program hilirisasi produk pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festifal (K3F), program usaha kecil IDAMAN dan Program Kukar kraetif IDAMAN.

4. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Akses terhadap infrastruktur, baik infrastruktur permukiman, air bersih, listrik ataupun fasilitas lainnya dapat menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan baik berupa kebutuhan permukiman yang layak, akses terhadap air bersih, energi listrik untuk penerangan dan lain-lain. Rencana program yang dibuat sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN dalam emndukung misis keempat antara lain: Program pemantapan konektivitas wilayah, Program fasilitasi perumahan rakyat, Program air bersih desa, Program klik kampungku.

5. Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Akses terhadap infrastruktur, baik infrastruktur permukiman, air bersih, listrik ataupun fasilitas lainnya dapat menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan baik berupa kebutuhan permukiman yang layak, akses terhadap air bersih, energi listrik untuk penerangan dan lain-lain. Rencana program yang dibuat sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN dalam mendukung misi keempat antara lain: Program pemantapan konektivitas wilayah, Program fasilitasi perumahan rakyat, Program air bersih desa, Program klik kampungku.

Hal lain yang juga ditelaah pada sub bab ini adalah program prioritas Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 sebagaimana yang disampaikan pada waktu kampanye. Bupati Wakil Bupati Kutai Kartanegara mempunyai beberapa program prioritas yang dirangkum dalam Kukar Idaman, yang merupakan kelanjutan dari tahap pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD, maka hasil telaahan menunjukkan bahwa BPKAD mendukung misi ***Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani***. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD sebagai perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan ***penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah***.

Pencapaian misi Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani membutuhkan proses pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan terukur serta dapat merespon permasalahan atau isu strategis dalam pengelolaan keuangan. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diharapkan akan mendorong pencapaian target-target sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan 2021-2026.

Bertitik tolak dari Visi, Misi yang relevan, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Visi Perangkat daerah berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah :

**TERWUJUDNYA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN**

Sejalan dengan visi di atas, maka misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Penyusunan Renstra BPKAD 2021 - 2026 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra BPKAD selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional .

Pada Program Pembangunan Nasional tercantum Visi Kementerian Keuangan yaitu :

“ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.

3.3.2 Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2019-2023. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 adalah;

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel ”

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah daerah, antara lain;

1. Meningkatkan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik”, yang mempunyai tujuan Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah”, yang mempunyai tujuan Meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas”, yang mempunyai tujuan Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel.

Dari uraian sasaran jangka menengah yang ada pada Renstra tersebut diatas, dibawah ini diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari layanan OPD yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan layanan OPD terkait dengan sasaran yang ada pada Renstra Pusat maupun Provinsi.

a. Faktor-faktor penghambat :

- 1) Kurangnya respon dan ketaatan terhadap pemanfaatan keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasi keuangan yang belum optimal;
- 2) Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi bidang-bidang dan lintas sektor dalam pengelolaan keuangan;
- 3) Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam mengkaji dan mengevaluasi produk hukum daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
- 4) Belum tersedianya data yang baik dan kapasitas SDM yang masih rendah dalam proses penyusunan dokumen keuangan dan aset daerah;

b. Faktor-faktor pendorong :

- 1) Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
- 2) Adanya peraturan per UU-an yang mengatur tentang proses evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
- 3) Adanya peraturan per UU-an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
- 4) Adanya perhatian dan dukungan data dari setiap SKPD serta yang disediakan melalui sistem informasi;
- 5) Tuntutan per-UU-an yang menuntut sistem penyusunan dan penganggaran "Follow money to function";
- 6) Semakin tingginya perhatian terhadap evaluasi sebagai pengukuran tingkat keberhasilan;
- 7) Adanya pendanaan untuk bimtek peningkatan kapasitas SDM;
- 8) Komitmen pimpinan dan staff dalam mengatur keseimbangan APBD;
- 9) Kerjasama antar SKPD dan BPKP dengan penyediaan SIMDA Keuangan, dan SIMDA Barang Daerah;
- 10) adanya tuntutan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data;

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program

(KRP), Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, diketahui bahwa rekomendasi mitigasi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD. Untuk itu tidak dilakukan telaahan terhadap KLHS.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang saat ini harus diperhatikan, yaitu :

1. Peningkatan kinerja kelembagaan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Peningkatan kualitas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta penyusunan laporan keuangan.
4. Penyajian data dan informasi keuangan daerah yang akurat dan mutakhir.
5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPKAD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

4.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

MISI RPJMD	TUJUAN MISI RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KETERKAITAN DENGAN SASARAN PEMDA	SASARAN STRATEGI
1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transpaansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik
	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 beserta indikator kinerjanya lebih rinci disajikan dalam tabel T-C.25 sebagai berikut:

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan		Nilai sakin perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Predikat akuntabilitas BPKAD Keuangan Daerah	69,85	70	70,5	71	71,5	72
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Indek pengelolaan keuangan daerah	0 (skor)	6	6,5	6,9	7,3	7,5
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Dokumen	25	29	29	29	29
		Persentase Tahapan Penyusunan APBD Teapt Waktu	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	100 (Tepat Waktu)	100	100	100	100	100
		Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik	Ketepatan waktu dan keteraksesan Dokumen.	25 (Dokumen)	25	29	29	29	29
		Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.	100	100	100	100	100	100
		Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran	Prosentase ASN yang mendapatkan pembinaan.	80	85	100	100	100	100

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100 % (58 OPD)	100	100	100	100	100
		Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi	Prosentase pemenuhan peraturan dan SAP.	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	Jumlah PPK OPD yang mendapatkan Pembinaan Penyusunan SAP.	100 (58 OPD)	100	100	100	100	100
		Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	Prosentase pemenuhan peraturan Pengelolaan Perebendaharaan Daerah.	100	100	100	100	100	100
		Persentase Transaksi Non Tunai	Prosentase OPD dalam Transaksi Non Tunai	90	100	100	100	100	100
		Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	Persentase penerbitan SP2D	90	90	90	90	90	90
		Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Prosentase OPD mendapat pembinaan Penatausaha keuangan.	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	Prosentase Penyaluran BTT dan ADD	100	100	100	100	100	100

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Optimalisasi pengelolaan aset daerah	75%	80%	90%	100%	100%	100%
		Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Prosentase Pemenuhan Peraturan Pengelolaan BMD	75	100	100	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Prosentase PD melaksanakan Perencanaan dan Penatausahaan BMD	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Prosentase PD melaksanakan Rekon BMD.	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Prosentase PD mendapat Pembinaan Penatausahaan BMD	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI SKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan telah tersedianya Perda SOPD, Kualitas Sumber daya Aparatur dan Komitmen pegawai yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 2 strategi yaitu;

- 1) Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD
- 2) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah

5.2 KEBIJAKAN SKPD

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

- 1) Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan Administrasi.
- 2) Peningkatan Kualitas Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah.
- 3) Peningkatan Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dalam mewujudkan laporan yang akuntabel.
- 5) Pengembangan sistem untuk peningkatan kinerja pelayanan.
- 6) Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah.

Adapun Strategi dan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rinci disajikan dalam tabel T-C.26 sebagai berikut:

Tabel TC.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia							
MISI : Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1.1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	1	Peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik	1	Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan Administrasi
						2	Peningkatan Kualitas Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	2.1	ketepatan waktu Penetapan APBD dan Perubahan	2	Peningkatan sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	3	Peningkatan Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
			Meningkatnya PD dalam menyampaikan LK tepat Waktu			4	Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dalam mewujudkan laporan yang akuntabel

VISI : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia				
MISI : Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efesien dan Melayani				
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D		5 Pengembangan sistem untuk peningkatan kinerja pelayanan
		Meningkatnya PD dalam pengelolaan Aset dengan Baik		6 Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya pencapaian sasaran dengan beberapa strategi dan kebijakan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dilakukan melalui program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penyajian program dan kegiatan BPKAD dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai 2021 sampai dengan 2026 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Perencanaan program dan kegiatan setiap tahun mulai 2021 sampai dengan 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD. Selanjutnya Renja BPKAD diselaraskan dengan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD untuk menetapkan program dan kegiatan dalam Renja BPKAD. Rencana program dan kegiatan prioritas BPKAD untuk periode 2021 sampai dengan 2026 secara terstruktur dapat dilihat pada bagan berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Strategi Pertama

Sasaran		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S1: Peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik			
1.	Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2	Peningkatan Kualitas Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah		

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Kedua

Sasaran		1. Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan 2. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S2 : Peningkatan sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah			
1.	Peningkatan Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Indek Pengelola Keuangan Daerah.
2.	Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dalam mewujudkan laporan yang akuntabel		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Pengembangan sistem untuk peningkatan kinerja pelayanan		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah

Adapun program teknis , kegiatan dan pendanaan secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun mendatang dapat dijabarkan pada tabel T-C.27 sebagai berikut:

Tabel T-C.27.

Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode					Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
											Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
1	2	3					4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan							nilai saki perangkat daerah	predikat	b	b		bb		bb		bb		bb		bb		bpkad	kab. kukar	
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja bpkad						predikat akuntabilitas bpkad	nilai	69.85	70		70.5		71		71.5		72		72				
		5	2				keuangan																	
		5	2	1			program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	nilai hasil evaluasi lakip perangkat daerah	nilai	69.85	70		70.5	38,451,964,497	71	38,651,964,497	71.5	38,451.964,497	72	38.651.964,497	72	204.079.344.508		

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode					Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
											Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
1	2	3					4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5	2	1	2	1	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100	484,135,000	100	484,135,000	100	484,135,000	100	484,135,000	100	484,135,000	100	2,420,675,000			
		5	2	1	2	1	1	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan	dokumen		3	116,860,000	3	116,860,000	3	116,860,000	3	116,860,000	3	116,860,000	15	584,300,000	bpkad	kab. kukar
		5	2	1	2	1	2	koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	jumlah dokumen rka	dokumen		1	61,560,000	1	61,560,000	1	61,560,000	1	61,560,000	1	61,560,000	5	307,800,000	bpkad	kab. kukar
		5	2	1	2	1	3	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	jumlah dokumen rka perubahan	dokumen		1	45,780,000	1	45,780,000	1	45,780,000	1	45,780,000	1	45,780,000	5	228,900,000	bpkad	kab. kukar
		5	2	1	2	1	4	koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	jumlah dokumen dpa	dokumen		1	61,560,000	1	61,560,000	1	61,560,000	1	61,560,000	1	61,560,000	5	307,800,000	bpkad	kab. kukar
		5	2	1	2	1	5	koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	jumlah dokumen dpa perubahan	dokumen		1	45,780,000	1	45,780,000	1	45,780,000	1	45,780,000	1	45,780,000	5	228,900,000	bpkad	kab. kukar
		5	2	1	2	1	6	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	jumlah koordinasi dan dokumen pelaporan	laporan		5	69,560,000	5	69,560,000	5	69,560,000	5	69,560,000	5	69,560,000	25	347,800,000	bpkad	kab. kukar
										dokumen		2		2		2		2		2		10	-		
		5	2	1	2	1	7	evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi	dokumen		3	83,035,000	3	83,035,000	3	83,035,000	3	83,035,000	3	83,035,000	15	415,175,000	bpkad	kab. kukar

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode					Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
											Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		5	2	1	2	2	administrasi keuangan perangkat daerah	presentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100	33.090.616.849	100	22.044.084.353	100	22.044.084.353	100	22.044.084.353	100	22.044.084.353	100	121.266.954.261			
		5	2	1	2	2	1	penyediaan gaji dan tunjangan asn	tersedianya gaji dan tunjangan asn	orang		178	31.945.954.849	12	20.899.422.353	12	20.899.422.353	12	20.899.422.353	12	20.899.422.353		115.543.644.261		
		5	2	1	2	2	2	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	jumlah laporan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	laporan		10	151.860.000	10	151.860.000	10	151.860.000	10	151.860.000	10	151.860.000		759.300.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	2	3	pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	dokumen verifikasi		600	67.930.000	600	67.930.000	600	67.930.000	600	67.930.000	600	67.930.000		339.650.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	2	4	koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd	jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd	dokumen		1	62.062.000	1	62.062.000	1	62.062.000	1	62.062.000	1	62.062.000		310.310.000	BPKAD	Kab. Kukar

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode					Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
											Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		5	2	1	2	2	5	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	jumlah dokumen laporan keuangan	dokumen		1	91.560.000	1	91.560.000	1	91.560.000	1	91.560.000	1	91.560.000		457.800.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	2	6	pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	jumlah laporan bahan tanggapan	laporan		1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000		210.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	2	7	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd	jumlah laporan keuangan skpd	bulan		12	648.284.000	12	648.284.000	12	648.284.000	12	648.284.000	12	648.284.000		3.241.420.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	2	8	penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dokumen		1	80.966.000	1	80.966.000	1	80.966.000	1	80.966.000	1	80.966.000		404.830.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	3		administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	100	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000		
		5	2	1	2	3	1	penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd	jumlah dokumen perencanaan kebutuhan bmd	dokumen		1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		400.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	5		administrasi kepegawaian perangkat daerah	persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	325.360.599	100	345.000.000	100	545.000.000	100	345.000.000	100	545.000.000	100	2.105.360.599		

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode					Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
											Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		5	2	1	2	5	1	peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	jumlah dokumen peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	dokumen		4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000		200.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	5	2	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah pakaian dinas	stel		200	-	200	-	200	200.000.000	200	-	200	200.000.000		400.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	5	3	pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	jumlah dokumen administrasi kepegawaian	dokumen		1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		400.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	5	4	koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	jumlah koordinasi dan dokumen informasi kepegawaian	laporan		6	30.360.599	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		230.360.599	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	5	1	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah peserta pengembangan kompetensi	Orang		20	175.000.000	20	175.000.000	20	175.000.000	20	175.000.000	20	175.000.000		875.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	6		administrasi umum perangkat daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	2.117.918.220	100	2.117.918.220	100	2.117.918.220	100	2.117.918.220	100	2.117.918.220	100	10.589.591.100		
		5	2	1	2	6	2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit		65	476.474.720	65	476.474.720	65	476.474.720	65	476.474.720	65	476.474.720		2.382.373.600	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	6	4	penyediaan bahan logistik kantor	jumlah penyediaan bahan logistik	porsi		200	124.989.680	200	124.989.680	200	124.989.680	200	124.989.680	200	124.989.680		624.948.400	BPKAD	Kab. Kukar

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi					
												2022		2023		2024		2025				2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								kantor																		
		5	2	1	2	6	5	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	paket		1	184,580,000	1	184,580,000	1	184,580,000	1	184,580,000	1	184,580,000		922,900,000	bpkad	kab. kukar	
		5	2	1	2	6	8	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	kali		100	781,296,000	100	781,296,000	100	781,296,000	100	781,296,000	100	781,296,000		3,906,480,000	bpkad	kab. kukar	
		5	2	1	2	6	10	penatausahaan arsip dinamis pada skpd	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis	dokumen		1	251,857,820	1	251,857,820	1	251,857,820	1	251,857,820	1	251,857,820		1,259,289,100	bpkad	kab. kukar	
		5	2	1	2	6	11	dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	jumlah website	website		1	298,720,000	1	298,720,000	1	298,720,000	1	298,720,000	1	298,720,000		1,493,600,000	bpkad	kab. kukar	
		5	2	1	2	6		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	12,399,394,124	100	12,399,394,124	100	12,399,394,124	100	12,399,394,124	100	12,399,394,124	100	61,996,970,620			
		5	2	1	2	8	2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik	bulan		12	1,039,640,000	12	1,039,640,000	12	1,039,640,000	12	1,039,640,000	12	1,039,640,000		5,198,200,000	bpkad	kab. kukar	

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5	2	1	2	8	4	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah tenaga ptt yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran	orang	7313	7313	11.852.383.052	7313	11.359.754.124	7313	11.359.754.124	7313	11.359.754.124	7313	11.359.754.124	7313	57.291.399.548	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	9		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	961.432.800	100	961.432.800	100	961.432.800	100	961.432.800	100	961.432.800	100	4.807.164.000		
		5	2	1	2	9	1	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	bulan		12	151.851.400	12	151.851.400	12	151.851.400	12	151.851.400	12	151.851.400		759.257.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	9	2	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	bulan		12	101.548.400	12	101.548.400	12	101.548.400	12	101.548.400	12	101.548.400		507.742.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	1	2	9	6	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan yang mendapat pemeliharaan dan	unit		60	101.860.000	60	101.860.000	60	101.860.000	60	101.860.000	60	101.860.000		509.300.000	BPKAD	Kab. Kukar

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode							Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi			
													2022		2023		2024		2025		2026				kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
													Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
1	2	3							4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5	2	1	2	9	9	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	bulan		12	606,173,000	12	606,173,000	12	606,173,000	12	606,173,000	12	606,173,000		3,030,865,000	bpkad	kab. kukar		
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah									2. Indek Pengelolaan Keuangan daerah	Skor	0	6		6,5		6,9		7,3		7,5		7,5					
	2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah								2. Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	0	25		29		29		29		29		29					
									3. keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	0	25		29		29		29		29		29					
	3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah								4. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	Perse n	100	100		100		100		100		100		100					

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi						
												2022		2023		2024		2025				2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		5	2	2				2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2. Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD	Perse	100	100		100		100		100		100		100					
									2. Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Perse	100	100	487.321.609.259	100	494.888.282.129	100	496.180.617.238	100	502.115.830.951	100	492.628.055.350	100	2.467.899.462.423				
									3. Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	Perse	90	90		90		90		90		90		90					
		5	2	2	2	1		8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8. Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	Perse	100		4.020.000.000	100	4.020.000.000	100	4.020.000.000	100	4.020.000.000	100	4.020.000.000	100	20.100.000.000				
									9. Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	100	100	10		100		100		100		100		100					
									10. Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100	100	10		100		100		100		100		100					

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi						
												2022		2023		2024		2025				2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		5	2	2	2	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		1.000.000.000	BPKAD	Kab. Kukar		
		5	2	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		1.000.000.000	BPKAD	Kab. Kukar		
		5	2	2	2	1	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	OPD		58	250.000.000	58	250.000.000	58	250.000.000	58	250.000.000	58	250.000.000		1.250.000.000	BPKAD	Kab. Kukar		
		5	2	2	2	1	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	OPD		58	250.000.000	58	250.000.000	58	250.000.000	58	250.000.000	58	250.000.000		1.250.000.000	BPKAD	Kab. Kukar		
		5	2	2	2	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	OPD		58	135.000.000	58	135.000.000	58	135.000.000	58	135.000.000	58	135.000.000		675.000.000	BPKAD	Kab. Kukar		
		5	2	2	2	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	OPD		58	135.000.000	58	135.000.000	58	135.000.000	58	135.000.000	58	135.000.000		675.000.000	BPKAD	Kab. Kukar		

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				DPA-SKPD																
		5 2 2 2 1 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD	Raper da		1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		4.000.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
				Rancangan perda tentang APBD	Raper da		1		1		1		1		1			-		
		5 2 2 2 1 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raper da		1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		4.000.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
				Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD	Raper da		1		1		1		1		1			-		
		5 2 2 2 1 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raper da		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		1.500.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5 2 2 2 1 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan.	Raper da		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		1.000.000.000	BPKAD	Kab. Kukar

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5 2 2 2 1	1 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		2.500.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5 2 2 2 1	1 2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Laporan		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		1.250.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5 2 2 2 1	1 3	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD		58	-	58	-	58	-	58	-	58	-		-	BPKAD	Kab. Kukar
		5 2 2 2 2		9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	12. Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	Person	Persen	100		100		100		100		100		100			
					13. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	Person	Persen	Person	1,080,911,910	100	1,080,911,910	100	1,080,911,910	100	1,080,911,910	100	1,080,911,910	100	5,404,559,550		
					14. Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan	Person	Persen	Person		100		100		100		100		100			

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi					
												2022		2023		2024		2025				2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								penyusunan laporan sesuai SAP																		
		5	2	2	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan		1	79.545.455	1	79.545.455	1	79.545.455	1	79.545.455	1	79.545.455		397.727.275	BPKAD	Kab. Kukar	
		5	2	2	2	2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Laporan		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		300.000.000	BPKAD	Kab. Kukar	
		5	2	2	2	2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen		12	213.075.000	12	213.075.000	12	213.075.000	12	213.075.000	12	213.075.000		1.065.375.000	BPKAD	Kab. Kukar	
		5	2	2	2	2	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokumen		1	85.700.000	1	85.700.000	1	85.700.000	1	85.700.000	1	85.700.000		428.500.000	BPKAD	Kab. Kukar	

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi						
												2022		2023		2024		2025				2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
								Bank																			
		5	2	2	2	2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	Dokumen		10000	49.982.000	10000	49.982.000	10000	49.982.000	10000	49.982.000	10000	49.982.000		249.910.000	BPKAD	Kab. Kukar		
		5	2	2	2	2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	OPD		58	592.609.455	58	592.609.455	58	592.609.455	58	592.609.455	58	592.609.455		2.963.047.275	BPKAD	Kab. Kukar		
		5	2	2	2	3		10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	15. Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	Person	100		1.308.733.126		1.308.733.126		1.308.733.126		1.308.733.126		1.308.733.126		1.308.733.126				
									16. Persentase Realisasi Dana Transfer.	Prosentase	100	100		100		100		100		100		100		100			

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi							
												2022		2023		2024		2025				2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah				
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
									Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	Prosentase	100	100			100				5									
									17. Persentase Transaksi Non Tunai	Prosentase	100	100			100													
									18. Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	Prosentase	90	90	1,308,733,126		90	1,308,733,126							1,308,733,126			6,543,665,630		
									19. Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Prosentase	100	100			100													
		5	2	2	2	3	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen		72	162.712.000	1	162.712.000	1	162.712.000	1	162.712.000	1	162.712.000			162.712.000		BPKAD	Kab. Kukar	

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode					Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
											Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		5	2	2	2	3	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		50.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	2	2	3	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000		60.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	2	2	3	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen		4	599.999.800	4	599.999.800	4	599.999.800	4	599.999.800	4	599.999.800		599.999.800	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	2	2	3	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda		1	199.999.800	1	199.999.800	1	199.999.800	1	199.999.800	1	199.999.800		199.999.800	BPKAD	Kab. Kukar

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi						
												2022		2023		2024		2025				2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
								Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda		1		1		1		1		1							
		5	2	2	2	3	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	OPD		58	236.021.526	58	236.021.526	58	236.021.526	58	236.021.526	58	236.021.526		236.021.526		BPKAD	Kab. Kukar	
		5	2	2	2	4		11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20. Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	Perse	100	100	480.911.964.223	100	488.478.637.093	100	489.770.972.202	100	495.706.185.915	100	486.218.410.314	100	2.441.086.169.747				
		5	2	2	2	4	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	%		100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000		50.000.000.000		BPKAD	Kab. Kukar	

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi					
												2022		2023		2024		2025				2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5	2	2	2	4	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan	%		100	470.911.964.223	100	478.478.637.093	100	479.770.972.202	100	485.706.185.915	100	476.218.410.314		2.391.086.169.747	BPKAD	Kab. Kukar	
	meningkatkan dalam pengelolaan aset dengan baik								persentase perangkat daerah yang mampu mengelola aset dengan baik	%	75	80		85		90		95		100		100				
		5	2	3				program pengelolaan barang milik daerah	persentase akurasi data barang milik daerah tahun n-1	%	90	90	2,129,537,590	90	2,129,537,590	90	2,129,537,590	90	2,129,537,590	90	2,129,537,590	90	10,647,687,950			
		5	2	3	2	1		12. Pengelolaan Barang Milik Daerah	21. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Perse n	100	100		100		100		100		100		100				
									22. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Perse n	100	100	2.129.537.590	100	2.129.537.590	100	2.129.537.590	100	2.129.537.590	100	2.129.537.590	100	10.647.687.950			

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode						Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi						
												2022		2023		2024		2025				2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3						4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									23. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Perse n	100	100			100		100		100		100						
									24. Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Perse n	100	100			100		100		100		100						
		5	2	3	2	1	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Doku men		1	345.866.000	1	345.866.000	1	345.866.000	1	345.866.000	1	345.866.000		1.729.330.000		BPKAD	Kab. Kukar	
		5	2	3	2	1	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	Doku men		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		500.000.000		BPKAD	Kab. Kukar	
		5	2	3	2	1	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	Doku men		1	230.800.000	1	230.800.000	1	230.800.000	1	230.800.000	1	230.800.000		1.154.000.000		BPKAD	Kab. Kukar	
		5	2	3	2	1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	Doku men		36	163.746.000	40	163.746.000	50	163.746.000	50	163.746.000	80	163.746.000		818.730.000		BPKAD	Kab. Kukar	
		5	2	3	2	1	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	Doku men		1	414.187.240	1	414.187.240	1	414.187.240	1	414.187.240	1	414.187.240		2.070.936.200		BPKAD	Kab. Kukar	

RENSTRA BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

tujuan	Sasaran	Kode					Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome), kegiatan, dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
											Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
1	2	3					4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5	2	3	2	1	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dioptimalkan	Dokumen		600	749.938.350	600	749.938.350	500	749.938.350	300	749.938.350	300	749.938.350	2300	3.749.691.750	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	3	2	1	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	Dokumen		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		375.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	3	2	1	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		250.000.000	BPKAD	Kab. Kukar
		5	2	3	2	1	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	OPD		58	-	58	-	58	-	58	-	58	-	-	-		
jumlah total																									
												539.322.633.369		535.469.784.216		536.962.119.325		542.697.333.038		533.409.557.437		2.687.861.427.385			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Di masa datang, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja.

Indikator kinerja BPKAD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28. sebagai berikut :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,58	70	71	72	73	74	74
	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	0	6	6,5	6,9	7,3	7,5	7,5
	Indikator Sasaran :							
	Predikat akuntabilitas BPKAD	69,85	70	70,5	71	71,5	72	72
	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	100 % (Tepat Watu)	100	100	100	100	100	100
	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	93 %	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata waktu pemrosesan SPM ke SP2D	48 jam	24	24	24	24	24	24
	Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	85 %	90	90	90	90	90	90
	Persentase Perangkat Daerah Yang Mampu Mengelola Aset Dengan	75 %	80	85	90	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Baik							
II	INDIKATOR PROGRAM & KEGIATAN							
	Indikator Program							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,85	70	70,50	71	71,50	72	72,50
	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	100% Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	23.06 %	23	22	21	20.5	20	20
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	15.82 %	15.82	15.82	15.82	15.82	15.82	15.82
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-18.20 %	-18	-18	-17	-16.50	-16	-16
	Indikator Kegiatan							
	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100
	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah perangkat daerah	100 %	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100%	100	100	100	100	100	100
	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	90 %	90	90	9	90	90	90
	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100 %	100	100	100	100	100	100
	Jumlah BMD yang dikelola	75 %	90	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai institusi yang memiliki tugas pokok, fungsi dan otoritas sebagai pengelola keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk lebih mampu mengetahui, memahami persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat selanjutnya bertindak selaku katalisator agar persoalan-persoalan masyarakat tersebut dapat dituangkan dalam suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan, instansi maupun kantor terkait. Sehubungan dengan hal ini maka guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel dan transparan sebagai modal dasar pembangunan daerah yang bertumpu pada kepentingan rakyat, secara spesifik telah mencantumkan cara-cara mencapai tujuan dan sasaran serta dapat dikerjakan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, akan sangat tergantung pada jalinan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh komponen stakeholders.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 ini disusun dengan harapan agar dapat memberi koridor, arah dan yang terpenting adalah sebagai pemacu semangat untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai modal dasar pembangunan daerah guna memajukan dan mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk pelaksanaan selanjutnya akan dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana jangka pendek sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 5 tahun.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini disusun sesuai dengan keadaan saat ini. Adapun perubahan kondisi lingkungan dalam jangka pendek tentunya dapat diantisipasi pula melalui Rencana Kegiatan Tahunan atau program kerja yang disusun pada setiap tahun anggaran.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Renstra ini akan memudahkan arah kerja staf dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran (goal) yang diinginkan sebagai wujud pertanggungjawaban tugas kepada pimpinan.

Kerjasama dan tumbuhnya rasa memiliki serta tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas akan meningkatkan motivasi kerja. Oleh karena itu dengan adanya arah yang jelas dan terukur maka akan semakin mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga bermanfaat sesuai rentang waktu yang ditentukan dalam rencana ini.

Tenggarong, 6 September 2021.

 **KEPALA**

Sukotjo, SE
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197309081993021001